

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

(018.09.634036)

TAHUN ANGGARAN 2023

Periode 31 Desember 2023



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

Jln. Perintis Kemerdekaan Km 17,5 Makassar

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 17.5 Makassar

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Makassar, 31 Desember 2023



Kepala Balai


Sri Sasmita Dahlan, SP. M.Si
Nip. 19830319 2005012 001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Pendapatan Diterima Dimuka

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.3.4. Koreksi Lain-lain
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI SELATAN**

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM 17,5 MAKASSAR
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILE (0411) 554522
WEBSITE : sulsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sulsel@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 31 Desember 2023

Kepala Balai,




Sri Sasmita Dahlan, SP. M.Si
Nip. 19830319 2005012 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 323.370.760 atau mencapai 94,28% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 343.005.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 19.134.536.467,00 atau mencapai 97,47% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 19.631.877.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.675.982.344.408,00; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 1.675.743.035.755,00 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 239.308.653,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 41.966.000,00 dan Rp. 1.675.940.378.408,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 368.503.264,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.23.589.483.552,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-23.220.980.288,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp.103.280.000,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-23.324.260.288,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp1.680.453.472.989,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-23.324.260.288,00 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 18.811.165.707,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.1.675.940.378.408,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	343.005.000,00	323.370.760,00	94,28	563.056.718,00
Jumlah Pendapatan		343.005.000,00	323.370.760,00	94,28	563.056.718,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	6.933.126.000,00	6.876.544.239,00	99,18	9.662.649.362,00
Belanja Barang	B.4.	12.698.751.000,00	12.257.992.228,00	96,53	9.210.584.511,00
Belanja Modal	B.5.	0,00		0,00	39.979.999,00
Jumlah Belanja		19.631.877.000,00	19.134.536.467,00	97,47	18.913.213.872,00

II. NERACA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	0,00	103.280.000,00
Jumlah Aset Lancar		0,00	103.280.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	1.621.222.705.657,00	1.621.222.705.657,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	24.205.688.708,00	24.219.585.208,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	47.289.756.932,00	47.289.756.932,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	24.861.609.973,00	24.861.609.973,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	642.090.500,00	642.090.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	(42.478.816.015,00)	-38.039.948.210,00
Jumlah Aset Tetap		1.675.743.035.755,00	1.680.195.800.060,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	6.340.000,00	6.340.000,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2.	41.966.000,00	0,00
Aset Lain-lain	C.4.3.	1.319.728.279,00	1.305.831.779,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4.	-1.128.725.626,00	-1.112.646.346,00
Jumlah Aset Lainnya		239.308.653,00	199.525.433,00
Jumlah Aset		1.675.982.344.408,00	1.680.498.605.493,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.1.	0,00	45.132.504,00
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.2.	41.966.000,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		41.966.000,00	45.132.504,00
Jumlah Kewajiban		41.966.000,00	45.132.504,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	1.675.940.378.408,00	1.680.453.472.989,00
Jumlah Ekuitas		1.675.940.378.408,00	1.680.453.472.989,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		1.675.982.344.405,00	1.680.498.605.493,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	368.503.264,00	556,036,250,00
JUMLAH PENDAPATAN		368.503.264,00	556,036,250,00
KEBIAYAAN			
Beban Pegawai	D.2.	6.876.544.239,00	9,662,649,362,00
Beban Persediaan	D.3.	148.767.000,00	112.,431,500,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	8.322.306.128,00	6,822,307,166,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.169.489.072,00	1,058,544,064,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2.617,430.028,00	1,217,666,781,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.		0,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.		0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	4.454.947.085,00	4.889.119.956,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10.		0,00
JUMLAH BEBAN		23.589.483.552,00	23.762.718.829,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-23.220.980.288,00	-23.206.682.579,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.11.	-103.280.000,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12.		7.020.468,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-103.280.000,00	7.020.468,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-23,324.260.288,00	-23.199.662.111,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	1.680.453.472.989,00	1.685.302.977.946,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-23.324.260.288,00	-23.199.662.111,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.		0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.		0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.		0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.		0,00
Koreksi Lain-lain	E.3.4.		0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	18.811.165.707,00	18.350.157.154,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-4.513.094.581,00	-4.849.504.957,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	1.675.940.378.408,00	1.680.453.472.989,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi (BPSIP) adalah Unit Pelaksana Tugas Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen spesifik lokasi. Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Balai
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan mempunyai tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

1. BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan tugas BPSIP dikoordinasikan oleh Kepala BBPSIP

b. Fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.
2. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrument pertanian spesifik lokasi.
3. Melaksanakan pengujian, penerapan standar instrument pertanian spesifik lokasi.
4. Melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.
5. Melaksanakan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrument pertanian spesifik lokasi.
6. Melaksanakan pengelolaan produk instrument hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.
7. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.
9. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi

mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen

Pertanian Sulawesi Selatan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPATGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	100.350.000,00	100.350.000,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan standardisasi Lainnya	129.125.000,00	129.125.000,00
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	113.530.000,00	113.530.000,00
Jumlah Pendapatan	343.005.000,00	343.005.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.512.795.000,00	6.898.026.000,00
Belanja Lembur	35.100.000,00	35.100.000,00
Belanja Barang Operasional	4.283.212.000,00	4.258.122.000,00
Belanja Barang Non Operasional	359.177.000,00	3.191.302.000,00
Belanja Barang Persediaan	22.840.000,00	158.951.000,00
Belanja Jasa	510.600.000,00	1.181.885.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.026.338.000,00	1.169.491.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	487.200.000,00	2.739.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Belanja	15.237.262.000,00	19.631.877.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 323.370.760,00 atau mencapai 94,28 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 343.005.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	100.350.000,00	105.004.100,00	104,64
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0,00	12.209.000,00	100,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan standardisasi Lainnya	129.125.000,00	90.321.000,00	69,95
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	0,00	10.005.00,00	100,00
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	113.530.000,00	100.998,500,00	88,96
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan dan Pengembangan	0,00	4.833.160,00	100,00
Jumlah	343.005.000,00	323.370.760,00	94,28

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar -40,10% dibandingkan TA 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	105.004.100,00	0,00	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	12.209.000,00	13.453.000,00	-9,25
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan standardisasi Lainnya	90.321.000,00	94.478.000,00	-4,40
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	10.005.00,00	21.000.000,00	-52,36
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	100.998,500,00	410.955.250,00	-75,42
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan dan Pengembangan	4.833.160,00	0,00	100,00
Jumlah	323.370.760,00	539.886.250,00	-40,10

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp.19.134.536.467,00 atau 97,477 % dari anggaran belanja sebesar Rp,19.631.877.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	Naik (Turun) %
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	6.933.126.000,00	6.876.544.239,00	99,18
Belanja Barang	12.698.751.000,00	12.257.992.228,00	96,53
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Kotor	19.631.877.000,00	19.136.017.245,00	97,47
Pengembalian Belanja	0,00	1.480,778,00	100,00
Total Belanja	19.631.877.000,00	19.134.536.467,00	97,47

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,17% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Karena pagu anggaran tahun ini mengalami kenaikan dibanding dengan tahun lalu
2. Karena Jumlah Kegiatan bertambah

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	6.876.544.239,00	9.662.649.362,00	-28,83
Belanja Barang	12.257.992.228,00	9,210.584.511,00	33,09
Belanja Modal	0,00	39.979,999,00	-100,00
Total Belanja	19.134.536.467,00	18.913.213.872,00	-1,17

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.6.876.544.239,00 dan Rp.9.662.649.362,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 28,83% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Karena adanya 9 orang pegawai memasuki masa pensiun
2. Karena adanya perubahan tunjangan pada pegawai fungsional

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.843.879.017,00	9.662.649.362,00	-28,83
Belanja Lembur	34.146.000,00	0,00	100,00
Jumlah Belanja Kotor	6.878.025.017,00	9.662.650.053,00	-28,82
Pengembalian Belanja Pegawai	1.480.778,00	691,00	214,00
Jumlah Belanja	6.876.544.239,00	9.662.649.362,00	-28,83

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.12.257.992.228,00 dan Rp.9.210.584.511,00. Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 33,09,% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Karena adanya kegiatan Integrasi Sapi Perah dan Kentang (ICARE) di Kabupaten Gowa yang tahun lalu dananya terblokir.
2. Karena Pagu Belanja Barang mengalami kenaikan dibanding dengan tahun yang lalu

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	4.244.819.600,00	4.423.465.150,00	-4,04
Belanja Barang Non Operasional	3.039.902.650,00	1.907.207.808,00	59,39
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	148.767.000,00	113.016.500,00	31,63
Belanja Jasa	1.037.583.878,00	491.634.208,00	111,05
Belanja Pemeliharaan	1.169.489.072,00	1.057.594.064,00	10,58
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.617.430.028,00	1,217.666.781,00	114,95
Jumlah Belanja Kotor	12.257.992.228,00	9.210.584.511,00	33,09
Jumlah Belanja	12.257.992.228,00	9.210.584.511,00	33,09

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.39.979.999,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Karena pagu anggaran belanja modal tahun 2023 tidak dialokasikan.

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	39.979.999,00	-100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	39.979.999,00	-100,00
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja	0,00	39.979.999,00	-100,00

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.39.979.999,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100 % dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena :

1. Karena Pagu belanja modal peralatan dan mesin tidak dialokasikan.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	39.979.999,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	39.979.999,00	-100,00

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp-0,00% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Karena pada TA. 2023 belanja modal untuk gedung dan bangunan tidak dialokasikan

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.103.645.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	0,00	0,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	103.280.000,00
Jumlah	0,00	103.280.000,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.621.222.705.657,00 dan Rp.1.621.222.705.657,00.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	1.621.222.705.657,00
Mutasi Tambah	
	0,00
Mutasi Kurang	
	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	1.621.222.705.657,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.621.222.705.657,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.24.219.585.208,00 dan Rp.25.280.610.999,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	24.219.585.208,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	0,00
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	13.896.500,00
Saldo per 31 Desember 2023	24.205.688.708,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-21.681.838.031,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.523.850.677,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Tidak terdapat mutasi penambahan
2. Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:
 - Peralatan Rumah Tangga Rp.1.496.000,-
 - Alat Kedokteran Rp.2.000.000,-
 - Alat Laboratorium Rp.3.500.000,-
 - Komputer PC Rp.3.435.500,-
 - Peralatan Komputer Rp.3.465.000,-

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.47.289.756.932,00 dan Rp.47.358.373.932,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	47.289.756.932,00
Mutasi Tambah	
	0,00
Mutasi Kurang	
	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	47.289.756.932,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-11.805.181.032,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	35.484.575.900,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.861.609.973,00 dan Rp. 24.861.609.973,00.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	24.861.609.973,00
Mutasi Tambah	
	0,00
Mutasi Kurang	
	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	24.861.609.973,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-8.991.796.952,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	15.869.813.021,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 642.090.500,00 dan Rp.642.090.500,00.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	642.090.500,00
Mutasi Tambah	
	0,00
Mutasi Kurang	
	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	642.090.500,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	642.090.500,00

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.42.478.816.015,00 dan Rp.38.039.948.210,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	24.205.688.708,00	-21.681.838.031,00	2.523.850.677,00
2.	Gedung dan Bangunan	47.289.756.932,00	-11.805.181.032,00	35.484.575.900,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.861.609.973,00	-8.991.796.952,00	-8.991.796.952,00
4.	Aset Tetap Lainnya	642.090.500,00	0,00	642.090.500,00
Akumulasi Penyusutan		96.999.146.113,00	-42.478.816.615,00	54.520.330.098,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.340.000,00 dan Rp. 6.340.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	6.340.000,00
Mutasi Tambah	
	0,00
Mutasi Kurang	
	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	6.340.000,00
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2023	-3.975.000,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.365.000,00

C.4.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.41.966.000 dan Rp.0.00 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Dana Lainnya	41.966.000,00	0,00
Jumlah	41.966.000,00	0,00

C.4.3. Aset lain lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.319.728.279,00 dan Rp.1.305.831.779,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	1.305.831.779,00
Mutasi Tambah	
	0,00
Mutasi Kurang	
	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	1.319.728.279,00
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2023	-1.124.750.626,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	194.977.663,00

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.128.725.626,00 dan Rp.1.112.646.346,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.340.000,00	-3.975.000,00	2.365.000,00
2.	Aset Lain-Lain	1.319.728.279,00	-1.124.750.626,00	194.977.653,00
Akumulasi Penyusutan		1.326.068.279,00	-1.128.725.626,00	197.342.653,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

3C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.675.940.378.408,00 dan Rp.1.680.453.472.989,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.323.370.760,00 dan Rp.556.036.250,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, dan Perkebunan	105.004.100,00	0,00	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12.209.000,00	13.453.000,00	-9,25
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	90.321.000,00	94.478.000,00	-4,40
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0,00	400.000,00	-100,00
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	10.005.000,00	21.000.000,00	-50,00
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	100.998.500,-	410.955.250,00	-75,42
Pendapatan penelitian/Riset, Survey, Pemetaan dan Pengembangan	4.833.160,00	0,00	100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	15.750.000,00	-100,00
Jumlah	323.370.760,00	556.036.250,00	-40,10

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, dan Perkebunan adalah berupa 105.005.100.
2. Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek sebesar Rp. 105.005.100,- Merupakan Penjualan Gabah Konsumsi, penjualan sapi jantan yang sudah tdk produktif, penjualan kelapa sawit, penjualan kakao kering
3. Pendapatan layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek sebesar Rp. 10.005.000,- berupa sewa lahan kurang lebih 10 Ha.
4. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp. 90.321.000.000,- merupakan pendapatan dari pengujian sampel, pengukuran N, Fe, Mn, K, Cu, Persiapan Sampel, Pengukuran pH, Analisa tanah dll.
5. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp. 12.209.000,- dan sewa rumah dinas.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.6.876.544.239,00 dan Rp.9.662.649.362,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.887.946.500,-	6.479.558.500,00	-24,56
Beban Pembulatan Gaji PNS	68.442,00	85,699,00	-19,64
Beban Tunj. Anak PNS	80,459.650,00	109.498.948,00	-26,52
Beban Tunj. Beras PNS	246.380.890,00	322.631.100,00	23,63
Beban Tunj. Fungsional PNS	477.530.000,00	1.171.400.000,00	-59,23
Beban Tunj. PPh PNS	24.323.655,00	75.582.815,00	-67,82
Beban Tunj. Struktural PNS	22.185.000,00	13.860.000,00	60,06
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	330.986.880,00	449.937.300,00	-26,44
Beban Tunjangan Umum PNS	134.820.000,00	147.070.000,00	8,33
Beban Uang Lembur	34,146.000,00	0,00	100,00
Beban Uang Makan PNS	639.177.000,00	893.025.000,00	28,43
Jumlah	6.876.544.239,00	9.662.649.362,00	-28,83

Beban yang tersaji pada tabel diatas merupakan beban ASN yang jumlahnya 96 orang yang terdiri dari Golongan IV 9 orang, Golongan III 56 orang, Golongan II 25 orang dan Golongan I, 6 orang, dengan jumlah 246 jiwa.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.112.431.500,00 dan Rp.121.412.500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan konsumsi	148.767.000,00	112.431.500,00	32,32
Jumlah	148.767.000,00	112.431.500,00	32,32

Beban persediaan merupakan barang persediaan berupa ATK dan komputer suplies yang telah dimanfaatkan baik untuk kegiatan diseminasi, maupun operasional perkantoran.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.8.322.306.128,00 dan Rp.6.822.307.166,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Langganan Listrik	467.535.878,00	420.342.473,00	11,23
Beban Langganan Telepon	0,00	31.427.735,00	-100,00
Beban Sewa	155.748.000,00	18.000.000,00	-756,27
Beban Jasa Profesi	372.900.000,00	20.000.000,00	-1,765
Beban Jasa Lainnya	41.400.000,00	0,00	-100,00
Beban Keperluan Perkantoran	3.687.939.600,00	3.795.255.150,00	-2,83
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	140.880.000,00	161.400.000,00	-1271
Beban Barang Operasional Lainnya	416.000.000,00	466.667.000,00	10,88
Beban Bahan	2.308.138.650,00	346.667.000,00	565,81
Jumlah	8.322.306.128,00	6.822.307.166,00	21,99

- Pemenuhan kebutuhan pegawai untuk menunjang keperluan operasional perkantoran dalam hal ini kebutuhan rumah tangga Balai.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.69.489.072.,00 dan Rp.1.058.544.064,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	390.552.200,00	357.998.625,00	9,09
Beban Pemeliharaan Jaringan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	688.936.872,00	609.595.439,00	13,02
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	950.000,00	-100,00
Jumlah	1.169.489.072,00	1.058.544.064,00	0,47

Beban pemeliharaan gedung dan bangunan dan Pemeliharaan Peralatan dan mesin mengalami kenaikan karena untuk mempertahankan kondisinya supaya layak untuk digunakan, pemeliharaan tersebut adalah berupa :

- Pemeliharaan gedung kantor BPTP Sul-Sel, Kantor Kebun Percobaan Gowa, Kantor Kebun Percobaan Jeneponto, Kantor Kebun Percobaan Bone-Bone, Kantor Kebun Percobaan Mariri, Gedung Kantor Laboratorium Tanah Maros. 1.000 M2.
- Pemeliharaan jaringan adalah pemeliharaan halaman kantor berupa pemasangan pavin blok seluas kurang lebih 300 M2
- Pemeliharaan kendaraan roda empat, 13 unit, kendaraan roda tiga 3 unit, kendaraan roda dua 38 unit, traktor Roda empat 1 unit, traktor tangan 5 unit, combine 1 unit, AC 27 unit, komputer, laptop, printer 14 unit.
- Pemeliharaan jaringan instalasi listrik, jaringan air pada kantor BPTP, Kebun Percobaan dan Instalasi Laboratorium Maros

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.617.430.028,00 dan Rp.1.217.666.781,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2.617.430.028,00	1.217.666.781,00	114,95
Jumlah	2.617.430.028,00	1.217.666.781,00	114,95

1. Beban perjalanan dinas adalah untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi, Rapim, Pertemuan/Workshop, pelaksanaan kegiatan diseminasi, pendampingan, Perbenihan, Diseminasi Teknologi Peternakan, monitoring, Bimtek Teknis Perbenihan Terstandar, kegiatan ICARE sehingga Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 114,95%

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Tidak ada	-	-	-
Jumlah			

Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.4.454.947.085,00 dan Rp.4.889.119.956,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.258.960,00	1.692.038.784,00	-25,60
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.828.203.103,00	1.829.000.975,00	-0,04
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	47.239.865,00	47.239.865,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	1.306.919.334,00	1.308.188.668,00	-0,10
Beban Penyusutan Jaringan	11.441.419,00	11.441.420,00	-0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.182.780,00	1.210.244,00	80,36
Jumlah	4.454.947.085	4.889.119.956,00	-8,88

Penyusutan yang terjadi diatas merupakan penyusutan reguler melalui sistem aplikasi SIMAK-BMN

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pada Tahun Anggaran 2023 Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-103.280.000,00 dan 0,00.

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar per 31 Desember 2023 dan Desember 2022

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-103.280.000,00	0,00	100,00
Jumlah	-103.280.000,00	0,00	100,00

D.12. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	7,020.468,00	-100,00
Jumlah	0,00	7.020.468,00	-100,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.680.453.472.989,00 dan Rp. 1.685.302.977.946,00

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-23.324.260.288,00 dan Rp-23.199.662.111,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2023.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Jumlah	0,00

E.3.4. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.18.811.165.707,00 dan Rp.18.350.157.154,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	19.134.536.467,00
Diterima dari Entitas Lain	-323.370.760,00
Jumlah	18.811.165.707,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp-323.370.760,00 sedangkan DKEL sebesar Rp.19.134.536.467,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.675.940.378.408,00 dan Rp.1.680,453.472.989,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

- a. Pada Neraca terdapat Utang kepada Pihak Ketiga, (RPATA) senilai Rp. 41.966.000,- berupa Jasa layanan internet sebesar Rp. 18.000.000,- Jasa Keamanan (Security) sebesar Rp. 13.716.000,- dan Kebersihan (Cleaning Service) sebesar Rp.10.250.000,- namun sudah dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2024 sesuai SP2D No. 249991303002758.
- b. Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan fungsional/peneliti akibat perubahan jabatan pegawai senilai Rp. 126.300.000,- yang belum dilakukan penginputan kedalam SAKTI modul piutang serta belum disetorkan ke Kas Negara.
- c. Pada tahun anggaran 2022, DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan sampai bulan Juni 2021, mengalami revisi sebanyak 15 kali. DIPA Awal sebesar Rp.25.753.753.000,- SP- DIPA-018.09.2.634036/2022, tanggal 17 Nopember 2021.
 - Revisi DIPA ke-1 dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2023 tanggal 26Desember 2022 pagutetap menjadi Rp. 15.237.262.000,-
 - Revisi Ke-2 dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2023 tanggal 10 April 2023, tetap menjadi Rp.26.362.753.000,-
 - Revisi ke-3, dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2022 tanggal 15 Juli 2022 bertambah menjadi Rp. 18.877.262.000,-
 - Revisi ke-4 dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2023 tanggal 15 April 2023, berkurang menjadi Rp. 21.237.262.000,-
 - Revisi ke-5 dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2023 tanggal 07 Juli 2023 pagu tetap menjadiRp. 21.237.262.000,-
 - Revisi ke-6 dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2023 tanggal 18 Juli 2023 pagu bertambah menjadiRp. 21.967.262.000,-
 - Revisi ke-7 dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2023 tanggal 9Oktober 2023 Pagu Tetap Rp. 21.967.262.000,-
 - Revisi ke-8 dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2023 tanggal 31 Oktober 2023 pagu berkurang menjadi Rp. 20.142.493.000,-
 - Revisi ke-9 dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2023 tanggal 04 Nopember 2023 pagu tetapRp.20.142.493.000,-

- Revisi ke-10 dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2023 tanggal 6 Nopember 2023 pagu tetap menjadi Rp. 20.142.493.000,-
- Revisi ke-11 dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2023 tanggal 24 Nopember 2023 pagu berkurang menjadi Rp. 19.624.094.000,-
- Revisi ke-12 dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2023 tanggal 1 Desember 2023 pagu bertambah menjadi Rp. 19.934.094.000,-
- Revisi ke-13 dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2023 tanggal 12 Desember 2023 pagu tetap menjadi Rp. 19.934.094.000,-
- Revisi ke-14 dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2023 tanggal 19 Desember 2023 pagu berkurang menjadi Rp. 19.631.878.000,-
- Revisi ke-15 dengan Nomor : SP- DIPA-018.09.2.634036/2023 tanggal 22 Desember 2023 pagu berkurang menjadi Rp. 19.631.877.000,-

d. Pada Tahun Anggaran 2023, Pengelola Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan mengalami perubahan antara lain :

Jabatan	Semula	Menjadi
Kuasa Pengguna Anggaran	Dr. Ir.Symasuddin, M.Sc	Sri SasmitaDahlan, SP, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	Andi Wahyudi, S.Kom	Andi Wahyudi, S.Kom
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	Andi Wahyudi, S.Kom	A. Akmal Djufri, SH
Bendahara Pengeluaran	Herman Kasim	Juliana, SE
Bendahara Penerima	Rosdiana,SE.	Rosdiana,SE.